



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN KEPALA
BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 15.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H, M.H (F-PAN/Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos /Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2023,
2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP tahun 2024,
3. Penetapan RKA-K/L dan RKP tahun 2024.
Hadir : 18 orang Anggota hadir dari 50 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
3. Ribka Tjiptaning Ploretariyati.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, S.M.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 4 anggota:

1. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang anggota dari 5 anggota:

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Laksana Tri Handoko (Kepala BRIN).

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI;
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI;
Yang kami hormati Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) beserta
jajarannya, serta hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari kita dapat berkumpul dapat melaksanakan rapat dengar pendapat dan guna melaksanakan tugas-tugas konstituen kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara kesediaan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRIN dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda:

1. Progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023,
2. Pembahasan RKA-K/L RKP Tahun 2024,
3. Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2024.

Berdasarkan data dari secretariat, Anggota Komisi VII DPR RI telah hadir berjumlah 17 anggota dari 50 anggota Komisi VII yang terdiri atas 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar dapat rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dengan sifat terbuka. Apakah dapat di setujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.30 WIB)



Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 14.30 WIB atau maksimal atau 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan bersama. Apa dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Pada tahun 2023 BRIN mendapat alokasi postur anggaran pada APBN sebesar **6 triliun 380 juta miliar 960 ribu juta 69 juta 63 ribu rupiah**. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Komisi VII ingin mendengar progres pelaksanaan kegiatan BRIN sampai dengan semester pertama tahun 2023.

Komisi VII berharap agar serapan anggaran BRIN nantinya dioptimalkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan hasil riset dan inovasi di tengah masyarakat. Hal ini nantinya akan menjadikan bahan pertimbangan dalam penetapan pagu indikatif BRIN untuk tahun 2024. Selanjutnya dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 maka pada kesempatan ini disampaikan usul pagu indikatif belanja BRIN pada RAPBN tahun 2024 sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen 3,768 miliar.
- Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi 2,192 triliun. Dengan total 5,96086 triliun rupiah.

Secara umum terjadi terjadi perubahan alokasi anggaran BRIN sebesar kurang lebih 6% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Oleh karena itu Komisi VII DPR RI dapat ingin mendengarkan rincian penjelasan yang mendetail dari Kepala BRIN tentang rencana kerja dan anggaran RKA-KL tahun 2024 beserta *output* strategisnya.

Komisi VII DPR RI berharap dengan adanya diskusi lebih lanjut maka akan dapat dicarikan solusi terkait peningkatan anggaran bagi akselerasi kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di tanah air.

Untuk efektifnya waktu pembahasan, saya mohon untuk pembahasan ada 3 agenda tadi 2023 tadi secara detail sudah kita coba bahas. Jadi singkat saja Pak Kepala untuk yang 2023 dan kita putuskan di sini lanjut nanti ke yang 2024, jadi singkat saja untuk yang 2023 tadi Pak. Kami persilakan Pak pemaparannya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VII,



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan.

Mohon izin untuk menyampaikan progres sesuai agenda, progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. Jadi seperti ditayangkan pagu anggaran awal di tahun anggaran 2023 itu sebesar 6,387 triliun, dimana anggaran untuk program itu sebesar 2,246 triliun dan untuk dukungan manajemen 4,141 triliun.

Berikutnya realisasi anggaran. Untuk tahun anggaran 2023 pertanggal 16 Juni 2023 itu sebesar 38,5% dan perlu kami sampaikan bahwa BRIN terkena *automatic adjustment* dengan total 389,27 miliar. Untuk kami akan menyampaikan secara ringkas beberapa program yang sudah dilakukan pada semester ini.

Jadi yang pertama itu realisasi pembentukan BRIDA itu sudah berjalan. Jadi ada 9 provinsi dan 42 kabupaten kota yang telah membentuk BRIDA dan ada 26 serta 236 kabupaten kota yang masih berproses.

Kemudian kami juga di amanatkan untuk melakukan penyusunan regulasi terkait dengan Undang-Undang 21/2013 tentang Keantariksaan yang sudah keluar, yang terakhir adalah PP 7 Nomor 2023 dan RPP saat ini yang sedang berproses RPP Penyelenggaraan Badan Antariksa. Kemudian juga sebagai amanat Undang-Undang 11 Tahun 2019 itu akan ada 2 RPP yang sekarang sedang berproses, selain ada 2 perpres terkait penyelenggaraan kebun raya dan percepatan penyelenggaraan kecerdasan artifisial.

Kemudian untuk rekomendasi kebijakan pembangunan sesuai amanat yang dibebankan ke BRIN kami fokus untuk melakukan pendampingan terkait pengembangan kebijakan di empat Menko yaitu, Menko Ekonomi, Menko Polhukam, kemudian juga di Menko PMK dan satu lagi Menko yang lain, ya oh Menko Marvest ya mohon maaf.

Kemudian kami juga mendapatkan penugasan untuk menjadi *back office* dari layanan *super tax deduction* bagi penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi oleh industri yang *front office*-nya itu adalah di OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi BKPM dan kami membantu pelayanan untuk *tax deduction*-nya. Selain itu juga katalog elektronik, mohon maaf e-katalog produk inovasi ya ini jug ada di OSS BKPM dan itu kami juga membantu di *back office*-nya.

Kemudian untuk secara umum dari sisi riset dan inovasi kami sampaikan rangkuman dari kekayaan intelektual dan mitra lisensi yang sudah, sudah tercapai sampai dengan semester ini.



Berikutnya untuk capaian program. Jadi untuk capaian program ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah capaian program yang bersifat umum. Jadi yang meliputi seluruh apa pihak masyarakat umum, maksud kami baik yang RIM maupun program mobilitas periset.

Demikian yang bisa kami sampaikan untuk laporan pelaksanaan program tahun anggaran 2023, dan kami akan segera melakukan seperti tadi telah disepakati pelaksanaan MBBM mulai awal, mulai akhir bulan ini juga sampai dengan awal Bulan September.

Mohon izin untuk melanjutkan ke yang RKA-K/L dan RKP Tahun Anggaran 2024. Jadi saat ini pagu indikatif BRIN yang disampaikan dari Kementerian Keuangan untuk 2024 itu sebesar 5,961T dengan program yaitu sebesar alokasi untuk program sebesar 2,285T dan dukungan manajemen itu sebesar 3,675T.

Untuk pagu anggaran per program, jadi di BRIN ada 2 program, ada 3 program, mohon maaf ada 2 program yaitu program riset dan inovasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2,25T dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari fungsi pendidikan sebesar 32,8 miliar.

Pagu anggaran BRIN secara keseluruhan itu terbagi di 24 program seperti terlampir di halaman 20 dan halaman 21, dan sesuai diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, jadi kami mengusulkan tambahan dana abadi untuk penelitian, untuk menambah *top up* dari dana pokok dana abadi penelitian sebesar 5T untuk tahun anggaran 2024 untuk menambah akumulasi dana abadi penelitian yang saat ini jumlahnya baru 13 triliun.

Selain itu juga sesuai penugasan yang baru saja di berikan terkait dengan perkembangan terkini. Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran khususnya untuk penambahan belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan alokasi untuk CPNS dan CPPPK jadi P3K yang saat sedang dalam proses seleksi di BKN dan Kementerian PAN dan RB, serta adanya penugasan untuk melengkapi *infectio slide* jadi laboratorium untuk infeksi, untuk manusia khususnya dengan tingkat keamanan tinggi yang sangat diperlukan untuk pengembangan berbagai obat dan vaksin untuk menangani penyakit-penyakit infeksi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan.

Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Pimpinan, terkait dengan progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan juga usulan anggaran untuk tahun anggaran 2024. Saya kembalikan kepada Pimpinan, dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan mohon maaf meskipun ini sudah lewat bulan syawal, apabila semala ini ada kami melakukan kesalahan dan banyak hal dalam pelaksanaan program kami yang belum sempurna dan ke depan kami akan terus memperbaiki pelaksanaan program dan juga komunikasi khususnya dengan mitra. Terima kasih saya kembalikan.



*Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om santi santi santi om.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya terima kasih Pak Kepala BRIN.

Untuk pembahasannya silakan teman-teman untuk mendalami. Ada teman-teman untuk mendalami dari pembahasan tadi? Silakan Bu Diah.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VII,
Kepala BRIN beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini.

Terima kasih atas paparannya, ada mungkin sedikit catatan saja Pak Kepala. Yang pertama terkait dengan evaluasi tahun 2023, sesungguhnya kami mengharapkan sebuah format yang lebih komprehensif. BRIN ini adalah lembaga yang isinya para periset terbiasa dengan metode ilmiah, sangat detail dengan data. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi atau pencapaian kami tentunya juga berharap menggunakan standar yang baku sehingga kita juga bisa melihat ya, rencananya berapa, terealisasinya seberapa, kenapa belum tercapai, misalnya seperti itu.

Jadi saya kira ini halnya mungkin sederhana teknis Pak Kepala ya, tapi untuk lembaga seperti BRIN, yang isinya orang-orang pintar, yang isinya juga memahami betul tentang tata cara penulisan ilmiah *gitu*, masa untuk sebuah persentase di depan Komisi VII menyampaikan laporan yang sangat sederhana. Jadi ini sebuah catatan besar menurut saya Pak Kepala ya *gitu*. Karena ini menyangkut menurut saya juga kehormatan dari BRIN sendiri untuk menyajikan laporan yang bisa dibaca terkait dengan pencapaian program-program yang selama ini ada.

Yang kedua terkait dengan anggaran tahun 2023, saya mengapresiasi usulan peningkatan anggaran riset sekecil apapun ini sudah merupakan usulan yang peningkatan yang tadinya 2,246 triliun di 2023 di depan dinaikkan di 2,285 triliun ya.

Saya tentunya berharap bahwa dengan peningkatan usulan di bidang riset itu betul-betul memajukan iklim riset di Indonesia, Indonesia ini SDM-nya luar biasa, Pak. Kita memiliki kampus-kampus, lembaga-lembaga riset yang apa namanya memiliki reputasi yang baik. Karenanya dorongan daya dukung anggaran untuk penelitian untuk riset ini menurut saya sudah sangat selengkap untuk dimajukan.

Yang tantangan berikutnya adalah bagaimana komunikasi, kalau diproduksi tambang ada hilirisasi kalau di riset ini hilirisasinya dalam tanda kutip seperti apa. Dari program-program riset yang demikian luar biasa ini, ini kemudian implementasi dari program riset itu digunakan baik itu menjadi bagian dari program kementerian dan lembaga lainnya ya, di bidang pertanian misalnya, di bidang keamanan, di bidang lain-lain itu sangat banyak menurut saya dan ini tantangan terbesar ya.

Kita masih berhadapan contoh sederhana saja Pak Kepala ya. Tantangan kita ketika BRIN bekerja sama dengan PT DI misalnya mengembangkan N219 *gitu* ya dalam risetnya, begitu selesai dengan urusan itu *what next* dengan N219 *gitu*. BRIN menganggap ya risetnya sudah selesai *gitu*, berikutnya harus masuk itu tahapan industrialisasi. *Nah* ini gimana ini komunikasi antara BRIN dengan Kementerian Perindustrian misalnya *gitu*.

Jadi jangan sampai kita itu nanggung segala sesuatu. Punya cita-cita besar tetapi di dalam eksekusinya itu *nggak* komprehensif ya, langkahnya itu separo-separo selalu menyisakan PR yang tidak tuntas. Akhirnya hari ini kita punya N219 tapi *what next* dengan N219 yang membanggakan itu *gitu*, ini salah satu contoh saja *gitu* ya. Jadi saya berharap dengan kenaikan anggaran riset di tahun usulan anggaran riset di tahun 2024 satu hal yang sangat saya apresiasi dan juga tapi tadi tantangan *what next* setelah riset ini, ini yang mungkin juga harus lebih dibangun komunikasi dan sinergitas dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Juga saya mendukung Pak Kepala terkait dengan kenaikan dana abadi riset. Hanya saja kami di Komisi VII rasanya belum pernah mendapatkan gambaran atau laporan, dana abadi riset ini seperti apa penggunaannya *gitu*. Selama ini seperti apa pertanggung jawabannya kalau di katakan sekarang sudah ada 13 triliun tadi ya dana abadi riset. Mungkin saya yang tidak *well inform* saya merasa baru tahu tentang dana abadi riset ini, boleh jadi saya yang salah baru tahu. Tapi seingat saya selama saya berada di Komisi VII belum ada laporan tentang dana abadi riset ini bagaimana pengelolaannya, digunakan untuk apa, pertanggung jawaban yang 13 triliun itu seperti apa.

Jadi kalau secara prinsip dan daya dukung semangat kita untuk memajukan riset saya sepakat dana abadi riset ini dinaikan. Hanya saja secara akuntabilitas dari keuangan anggaran dan ini adalah menggunakan dana rakyat Indonesia, angka kenaikan 5 triliun itu atau angka yang dikelola sekarang 13 triliun ini *kan* bukan angka yang sedikit. Tentu kita juga berharap adanya sebuah gambaran dan informasi tentang pengelolaan dana riset tersebut.

Itu saja beberapa catatannya Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.



KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke Pak Maman silakan.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih Pimpinan atas kesempatannya.

*Saya mohon izin interaktif boleh Pimpinan ya. Saya mulai dari minta tolong sedikit penjelasan saja Pak dari Bapak terkait anggaran yang 2023. Saya bicara pada konteks program yang ada 7 program, yang program interaksi, sinergisitas BRIN dengan masyarakat, yaitu program Barista, PPBR, FUMI, GRI, Bimtek, Bimtek itu MBBM ya, produk inovasi riset Indonesia maju, mohon di jelaskan biar *nggak* rancu nanti.*

*Bantuan riset talenta inovasi itu dianggarkan 160 miliar ya Pak 2023, betul ya, benar Pak ya? Iya *kan*. Nah cuman saya dapat informasi jadi nol atau gimana maksudnya Pak, tidak terealisasi, maksudnya gimana si Pak mohon penjelasan aja itu aja Pak.*

*Jadi itu ada ada sekaligus aja Pak, jadi saya mohon informasinya program Barista 165 miliar, PPBR (Perusahaan Semula Berbasis Riset) 44 miliar, Fasilitas Usaha Mikro Berbasis Iptek 15,9 miliar, Grassroots Innovation 15,9 miliar, NBBM ataupun Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab itu 300 miliar, produk inovasi itu 150 miliar, Riset Indonesia Maju 110 miliar. Nah saya dapat informasi semuanya menjadi nol dan yang teralisasi hanya MBBM 180 miliar plus produk inovasi, namun penjelasannya *gitu* aja Pak. Terima kasih Pak, itu dulu.*

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Mohon izin Bapak Pimpinan untuk langsung menjawab.

Jadi terima kasih, jadi untuk dari 7 program untuk masyarakat itu ini yang sudah disepakati pada saat rapat anggaran bersama dengan Komisi VII tahun lalu dan itu yang kemudian kami usulkan juga ke Kementerian Keuangan

masuk ke Banggar juga. Tetapi di Undang-Undang APBN kami itu yang tersisa itu adalah yang MBBM Bapak, yang teralokasikan itu adalah MBBM ini sebesar 180 miliar tetapi itupun masih terkena *automatic adjustment*.

Demikian Bapak.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Maksudnya jadi akhirnya ditolak sama ama Kementerian Keuangan gitu Pak?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya tidak ada di pagu apa itu di RKA K/L kami, iya.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi total yang tertolak itu ada kurang lebih sekitar 500 miliaran ya?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya, iya betul dari 800 betul

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kan total itu ada 800 miliaran ya yang tertolak berarti kurang lebih sekitar 600 miliaran ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya betul.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nggak bukan, maksud saya jadi ini benar-benar tertolak 600 miliaran Pak.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya karena tidak ada di RKA-K/L-nya itu tidak ada Pak, begitu Pak iya. Jadi kalau di awal dulu misalnya untuk MBBM itu di tahun 2022 itu malah hanya

30 miliar Pak sebenarnya. Jadi itu yang kami minta waktu itu untuk kami usulkan di *top up*.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Nggak belum, belum, bentar dulu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nggak bukan ini sebentar.

Pak *kan* tadi Pak Maman ngitung itu Pak, yang pagu yang disetujui tadi Bapak sebut 6 koma berarti hanya sekitar 90-100 miliar yang ADD. *Nah* itu transfernya kemana?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya ya *kan* berbagai program yang lain Bu ya, khususnya itu banyakan itu di apa infrastruktur dan di ya.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tadi tadi ini barusan yang pertanyaan Pak Maman *kan* yang ADD itu *kan* jadi berapa Pak? Yang, yang kena *automatic adjustment* itu jadi berapa.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Automatic adjustment ada 300, 389 Bapak, 389 miliar.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

389 miliar

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

389 miliar, iya. 389 miliar.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dari semua yang diusulkan ya Pak ya, yang diusulkan dar RKA-K/L kemarin *kan*.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya dari seluruh RKA-K/L BRIN.

Iya jadi RKA-K/L BRIN *kan* ada banyak program Pak iya.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya *kan* tadi *kan* kalau usulan tahun 2023 *kan* usulan yang awal tadi 6,387 Pak ya?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya 6 koma ya.

6,387 itu RKA-K/L-nya Pak, yang sudah di sahkan di Undang-Undang APBN itu 6,387. Kemudian di Bulan Februari ada Februari awal Januari itu ada *automatic adjusment* kami kena total.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak 6387 itu sudah termasuk yang 800 belum?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya belum, belum Pak, belum.

Jadi di dalam, di dalam 6,87 itu yang teralokasi adalah 198 ya.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Iya gini, izin, izin boleh gini *nggak* Pimpinan.

Saya mohon maaf sekali lagi, *nggak* maksud saya *kan* ini terbuka tapi saya mohon bisa *nggak* mohon maaf saya agak telat tadi boleh *nggak* kita skors saja takutnya nanti liar lagi nanti, ini saya lihat ada yang belum tersinkronisasi nih. Jadi saya kalo saya boleh berkenan saya minta diskors 10 menit aja.

Karena *nggak* ini saya cuman menjaga jangan sampai nanti liar lagi isunya ini *kan* ini terbuka ini *kan*. Jadi mungkin saya mohon izin kepada pimpinan untuk boleh kalau boleh kita *skorsing* 10 menit aja.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua ini anggaran 2023 ini diputuskan masih menggunakan undang-undang yang Covid itu ya, dalam proses anggaran iya Pak ya. Di mana pemerintah punya otoritas langsung merubah yang *automatic adjustment*.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu di 22 Pak 22 anggaran 22, 23 udah *nggak*.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Anggaran 22, 23

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

23 *nggak*.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tapi itu di masukan 22 karena itu memang ada otoritas Menteri Keuangan untuk itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya makanya tadi kalau otoritas Menteri Keuangan untuk yang 22 di putuskan 21 ya yang tadi anggaran Covid itu. Anggaran untuk 22 yang diputuskan di 21. *Nah* cuman kalau yang 22 yang 23 yang diputuskan 22 sudah tidak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua.

Pak Kepala BRIN mau nanya itu yang langsung merubah itu Menteri Keuangan ya Pak?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Izin Bapak.

Yang *automatic adjustment*?

Kalau *automatic adjustment* itu di tetapkan di Paripurna Pak biasanya kami. Kemudian dia tidak mengubah tapi hanya jadi anggarannya masih ada tapi di bintang Pak, istilahnya di bintang jadi kami tidak bisa pakai begitu.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Berarti antara Menteri Keuangan dan Banggar, kalau Paripurna itu, itu tinggal ketuk Pak, berarti di Banggar ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Nggak maksud saya Paripurna di istana Pak, iya di istana iya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Berarti otoritas pemerintah ya masih ya, masih menggunakan undang-undang yang lama Pak Ketua, iya itu itu udah urusan pemerintah sih kalau *gitu*, ya saya *nggak* mau mengkritisi kalau pemerintah sekarang. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin tadi ada *dismiss* sedikit tadi yang dari Pak Maman, saya pikir boleh kita skors dulu 10 menit untuk menjelaskan masalah anggaran 2023 ini.

Rapat saya skor 10 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bisa kita mulai?

Skors saya cabut.

**(SKORS RAPAT DI CABUT PUKUL 14.05 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Hasil dari pembicaraan kita tadi di ruang pimpinan dan tadi ada sedikit pembahasan dari teman-teman, saya pikir tidak ada yang perlu di bahas lagi Pak masuk dalam ranah kesimpulan langsung dari hasil rapat yang ini. Atau tadi sebetulnya jangan-jangan masuk kesimpulan dulu tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak/Ibu, mungkin boleh di jawab dulu sama Pak Kepala. Tadi ada pertanyaan dari Bu Diah dan Pak Ramson tadi, mohon dijawab dulu sebentar nanti setelah itu kita masuk dalam kesimpulan ya.

Silakan Pak Handoko.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Mohon izin Bapak Pimpinan untuk menanggapi merespon tadi pertanyaan dari Bapak/Ibu Anggota.

Jadi yang pertama yang terkait N219 saat ini N219 sejak tahun lalu itu sebenarnya sudah mulai penjualan oleh rekanan kami yaitu PT DI (PT. Dirgantara Indonesia) dan sampai saat ini sudah ada 21 kontrak penjualan untuk N219. Sedangkan untuk risetnya kami masih melanjutkan untuk tipe N219 yang versi *amphibi*. Jadi kami juga mungkin akan lisensikan kembali dengan PT DI untuk yang *amphibi* tersebut.

Kemudian untuk dana abadi, jadi dana abadi penelitian itu diatur dengan Perpres 111 tahun 2021 saat ini. Dan dana abadi itu sepenuhnya dikelola oleh LPDP dalam konteks sebagai investor apa investasi maksud saya manajemen investasinya, sedangkan programnya untuk program riset itu di kelola oleh BRIN sedangkan untuk program beasiswa itu di kelola oleh Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama.

Jadi pengelolaan program itu maksudnya kami hanya mengelola program. Jadi uangnya tidak ke BRIN, jadi uangnya langsung berkontrak dari LPDP ke penerima tetapi kami memproses mendesain risetnya, memproses *review*-nya dan seterusnya dan setelah ditetapkan itu baru langsung berkontrak dengan LPDP.

Kemudian untuk ya itu untuk yang pengelolaan dana abadi. Kemudian iya untuk evaluasi program itu kami akan segera perbaiki dan untuk berikutnya juga untuk paparan terkait apa pelaksanaan program dan anggaran kami akan perbaiki seperti yang sudah di sampaikan tadi agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan ke publik dan juga mitra khususnya Komisi VII.

Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih Bapak Pimpinan saya kembalikan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya terima kasih, Pak.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan izin.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih Pimpinan.

Izin Pak Kepala BRIN Pak Handoko izin. Ini terkait dengan yang program tahun 2022 juga ya yang masih belum terbayarkan kampus-kampus ya yang tadi Bapak sampaikan.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI
HANDOKO):**

Iya mohon izin langsung menanggapi Bapak Pimpinan.

Iya jadi untuk yang tahun 2022 yang memang belum terbayarkan untuk Barista itu sekarang memang sedang kami proses dan kami akan segera membuat surat resmi dari BRIN yang untuk setiap Bapak/Ibu Anggota dengan lampiran daftar mahasiswanya dan statusnya saat ini. Apakah ada masalah atau apa dan sebagainya atukah sedang proses pembayaran dan seterusnya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Iya terima kasih Pimpinan itu aja.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke karena ini tadi yang kita masalahkan adalah Barista tadi Pak ya, Barista yang sudah masuk dan sudah akan direalisasikan. Ada berapa tadi kalau saya tidak salah dari Ibu info tadi 150 apa kampus ya yang sudah memberikan data dan sudah lengkap datanya, dari berapa kampus Ibu?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

380 Pak.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

380 iya. *Nah* itu nanti tolong dilampirkan nanti dalam laporan tertulis kepada kami nanti dari hasil rapat ini.

Oke saya masuk kesimpulan langsung, Bu Diah ada mau tambahan lagi *nggak*? Saya mau masuk kesimpulan *nih* Bu saya dari tadi nungguin Bu Diah nih, silakan Bu Diah.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, MI. Pol):

Menajamkan saja. Tadi saya berharap ada laporan evaluasi yang 2023 dengan lebih detail. Mungkin dibuat per- saya *nggak* tahu Pak, perdeputi atau per-, iya misalnya seperti itu Pak. Karena bukan apa-apa di kementerian lain kita juga menerima laporan per dirjen ya, setiap dirjen kita punya dokumennya Pak *gitu* ya. Jadi kalau untuk BRIN kita tidak berharap hanya BRIN aja seperti ini *gitu* tapi perbagian apalah yang biasa di.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Per-KPA Bu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, MI. Pol):

Iya misalnya per-KPA-nya atau gimana di BRIN, supaya lebih detail itu disusulkan nanti.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya kami akan susulkan Bapak Pimpinan iya.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik mari kita masuk ke dalam kesimpulan ya nanti disini kita coba pecah kesimpulannya seperti apa.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN. Senin, 19 Juni 2023

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BRIN untuk segera mempercepat realisasi kegiatan pada tahun anggaran 2023 yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti Bantuan Riset Talenta Inovasi atau Barista, Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau (PPBR), Fasilitas Usaha Mikro Berbasis Iptek atau (FUMI), Fasilitas Inovasi Akar Rumput (FIAR) dan Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

2. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kepala BRIN untuk menyelesaikan pembayaran program Barista paling lambat akhir Juni 2023, serta menyiapkan daftar mentor untuk calon penerima program Barista tahun 2023.

Setuju? Bapak?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

3. Komisi VII DPR RI telah memahami penjelasan dan bersepakat dengan Kepala BRIN terkait pagu indikatif BRIN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.960.861.421.000,-.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, MI. Pol):

Pimpinan, maaf sebentar.

Mungkin tadi terkait dengan harapan agar dikirimkan kembali kepada Komisi VII laporan pelaksanaan tahun anggaran 2023 secara rinci dan tertulis. Karena ini *kan* maksud saya gini kalau urutannya bisa di ke ataskan karena sebelumnya kan kita berbicara 2023 baru di berikutnya 2024 *gitu*, secara urutan saja *gitu* mungkin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke kita naikin yang yang kesimpulan yang 2023 nih dari bawah nih. Poin sebentar, 6 poin 6 ya?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Mungkin poin baru mungkin.

KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke.

Gimana Bu Diah?

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, MI. Pol):

Yang penting di pahami tadi maksudnya itu ya, Pak ya.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Progresnya juga di jelaskan di situ, Pak. Jadi progres beban dari anggaran yang ada realisasinya berapa dengan progresnya *gitu* loh Pak. Jadi secara, secara, secara *general* semuanya, *gitu* Pak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI
HANDOKO):**

Iya kami sudah melihat contoh.

**KETUA RAPAT (H .DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya contoh laporan dari kementerian lain itu Pak kurang lebih seperti itu.

Oke saya bacakan lagi ya.

Ke-3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 secara mendetail dan komprehensif kepada Komisi VII DPR RI. Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI telah memahami penjelasan dan bersepakat dengan Kepala BRIN terkait pagu indikatif BRIN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.960.861.421.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan teknologi fungsi pelayanan umum dengan nilai Rp2.252.618.908.000,-.
 - 2) Program riset dan inovasi pendidikan program riset dan inovasi ilmu fungsi pendidikan sebesar Rp32.800.000.000,-.
 - 3) Program dukungan manajemen fungsi pelayanan umum dengan nilai Rp3.675.442.513.000,-.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Udah *nganguk* ya, *nganguk* juga udah cukup *kok*.

5. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala BRIN terkait usulan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp538.393.916.000,-

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

6. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan dana abadi penelitian tahun anggaran 2024 sebesar Rp5 triliun.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

7. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana abadi penelitian.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

8. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaporan seluruh kegiatan yang ada di BRIN agar lebih komprehensif.

Saya pikir ini sama sebetulnya ama 2023 tadi tapi ini secara *general* bukan membahas 2023. Saya pikir boleh aja si masukin lagi ya, *nggak* apa-apa tetap ada ya.

Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaporan seluruh kegiatan yang ada di BRIN agar lebih komprehensif.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

9. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan sampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 26 Juni 2023.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian pembahasan agenda rapat dengar pendapat kita pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat kami persilakan kepada Kepala BRIN untuk menyampaikan sambutan penutup. Kami persilakan.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):

Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih atas kesempatan dan masukan yang diberikan kepada kami, dan tentu akan kami perhatikan untuk melakukan perbaikan ke depan. Jadi kami akan segera melaksanakan apa yang sudah menjadi kesimpulan pada hari ini dan menyampaikannya kepada Komisi VII.

Demikian terima kasih dari kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H .DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BRIN beserta jajarannya atas kerjasamanya yang baik dalam rapat ini. Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII. Akhirnya dengan mengucapkan *hamdallah* Rapat Dengar Pendapat pada hari ini saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

*Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

